

ANALISIS TEORI PERTENTANGAN KELAS KARL MARX DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Hendrika Ayuliani Muntiyas¹, Fera Kurnia Putri²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
[rikahendrika7@student.uns.ac.id¹](mailto:rikahendrika7@student.uns.ac.id)

ABSTRACT

This study discusses the industrial revolution 4.0 as an industrial revolution that implicates the internet, information, and communication technology in it. The research was written using the literature review research method which was presented descriptively. Meanwhile, the data source presented comes from relevant reading sources. The results of this study are that the industrial revolution 4.0 provides its advantages and challenges in its application, including problems in the workforce. Employment or labor in the era of the industrial revolution 4.0 made Karl Marx's theory of class conflict continue to last because of the inability of workers to improve their capabilities which resulted in the alienation of the workers.

Keywords: Karl Marx Class Conflict, Industrial Revolution 4.0, Employment

ABSTRAK

Kajian ini membahas revolusi industri 4.0 sebagai revolusi industri yang melibatkan teknologi internet, informasi, dan komunikasi di dalamnya. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka yang disajikan secara deskriptif. Sedangkan sumber data yang disajikan berasal dari sumber bacaan yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah revolusi industri 4.0 memberikan keuntungan dan tantangan dalam penerapannya, termasuk permasalahan di dunia kerja. Lapangan kerja atau perburuhan di era revolusi industri 4.0 membuat teori konflik kelas Karl Marx terus bertahan karena ketidakmampuan pekerja untuk meningkatkan kemampuannya yang mengakibatkan keterasingan pekerja.

Kata kunci: Konflik Kelas Karl Marx, Revolusi Industri 4.0, Ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Revolusi Industri merupakan suatu topik hangat yang seringkali diperbincangkan di masyarakat. Revolusi Industri secara sederhana dikatakan sebagai perubahan secara besar-besaran dalam bidang perindustrian. Dewasa ini, revolusi industri telah memasuki revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 memiliki ciri khusus pada munculnya peran internet dan teknologi informasi dan komunikasi. Internet dan teknologi informasi memiliki andil besar dalam perubahan-perubahan yang ada pada revolusi industri.

Perubahan yang terjadi dalam era revolusi industri 4.0 adalah dengan penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan robot dalam pelaksanaan kegiatan industri.

Keberadaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan robot menjadi suatu momok kekhawatiran bagi para pekerja terhadap pekerjaan yang selama ini dilakukannya. Hal ini semata-mata keadaan tersebut dapat menggeserkan peran tenaga kerja manusia dan menggantikannya dengan robot. Terlebih, sebagaimana dinyatakan oleh Naveen Menon seorang Presiden Cisco untuk Asia Tenggara yang menyatakan bahwa bilamana teknologi baru diterapkan, produktivitas akan menurunkan biaya produksi, sehingga dapat membuat harga barang dan jasa turun.

Revolusi Industri 4.0 pada dasarnya merupakan sejarah besar dalam bidang perindustrian. Bagi pengusaha, hal ini berdampak baik karena dapat memangkas biaya produksi, sementara bagi para pekerja menjadi tantangan tersendiri untuk dapat mampu meningkatkan kemampuan dengan menyesuaikan tren pekerjaan di era revolusi industri 4.0 agar tidak tergerus oleh peradaban.

Berbicara dunia industri dan kaitannya dengan pekerja erat kaitannya dengan teori pertentangan kelas Karl Marx. Dalam teorinya, Karl Mark menganggap bahwa terdapat pertentangan kelas yang terjadi akibat adanya perbedaan akses kekuasaan. Dalam hal ini terdapat ketimpangan kelas dan ketimpangan sosial yang terjadi pada kaum buruh dan majikan atau yang kemudian dalam hal ini Karl Marx membaginya dalam dua kelas, yakni Kelas Borjuis dan Kelas Proletariat (Prinada, 2022). Hal ini menjadikan terciptanya suatu kondisi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Perbedaan kelas ini menjadikan para buruh dengan kelas sosial rendah terasingkan dalam tatanan sosial akibat eksploitasi korporasi dan kapitalisme. Dalam kapitalisme sekarang, para pemilik modal sejatinya masih bergantung pada buruh yang berakibat pada perlakuan adil pada buruh. Akan tetapi, revolusi industri 4.0 seolah mengecilkan peran buruh atau pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Otomatisasi seolah menggerus buruh bilamana kemajuan revolusi industri 4.0 tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM buruh. Hal ini menimbulkan kelas sosial semakin nyata, karena buruh yang tidak turut berkembang akan tetap terasing sementara pemilik modal atau kelas borjuis semakin diuntungkan.

Terhadap pemaparan sebagaimana telah dijelaskan lebih dulu, maka sejatinya teori pertentangan kelas hasil pemikiran tokoh filsuf Karl Marx memiliki relevansi dengan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan memunculkan suatu permasalahan, yakni bagaimana permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia di era revolusi industri 4.0 dan bagaimana relevansi teori pertentangan kelas Karl Marx terhadap

sistem ketenagakerjaan Indonesia pada revolusi industri 4.0

LANDASAN TEORI

Dasar Pemikiran Sosialisme Karl Marx

Pemikiran Karl Marx lahir dari adanya represif negara Jerman yang menghapus kebebasan manusia. Karl Marx membangun pemikiran sosialisme untuk mengembalikan kebebasan manusia dari sistem kapitalisme yang berlaku pada saat itu. Kritik terhadap bidang ekonomi dan politik menjadi hal yang mendasari pemikiran Karl Marx (Abdillah et al., 2021). Arah yang dituju adalah perlunya pembebasan kemanusiaan terhadap eksploitasi sumber daya akibat dari sistem kapitalisme.

Terdapat beberapa dasar pemikiran yang membuat Karl Marx membangun pemikiran tersebut di antara lainnya sebagai berikut: pertama, pembebasan manusia dari sistem politik reaksioner (Bahari, 2010). Kedua, untuk mengembalikan kepercayaan diri manusia pada waktu itu yang merasa terasingkan. Keterasingan tersebut dikarenakan eksploitasi sumber daya manusia oleh sistem kapitalisme. Ketiga, Adanya penguasaan diri manusia akibat kelas pemilik modal dengan pekerja, sehingga manusia hanya akan bebas jika memiliki alat-alat dan faktor produksi. Keempat, hak-hak pribadi yang terpusatkan harus dihapuskan dengan penerapan sistem sosialisme. Kelima, cara yang harus dilakukan adalah menghapuskan hak milik pribadi melalui revolusi kelas buruh, dan hal tersebut akan membangun masyarakat tanpa kelas (Bahari, 2010).

Teori Pertentangan Kelas

Menurut Karl Marx, sejarah manusia selalu berkaitan dengan pertentangan kelas. Hal tersebut terjadi antara kaum yang memiliki hak istimewa lebih (previllege) dengan kaum lemah, seperti pertentangan kaum bangsawan dengan rakyat biasa, kaum merdeka dengan rakyat yang masih terjerat penjajahan, dan tuan pemilik tanah dengan budak. Pertentangan tersebut perlahan akan terus membuka peluang terjadinya perang untuk melorotkan kaum penguasa.

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain terjadi jika terdapat proses ekonomi di dalamnya, dalam hal ini terjadi jual beli atau tukar-menukar barang. Hal tersebut, menimbulkan terbentuknya kelas-kelas antara manusia yang memiliki sumber daya seperti menguasai tanah dengan manusia yang tidak memiliki sumber daya. Sikap ketergantungan terjadi antar kelas tersebut yang menimbulkan konflik antar kelas, untuk

menuntut hak dan kepentingan masing-masing. Di era kapitalisme yang melahirkan butuh dan dan tuan membuat keadaan semakin memburuk di mana majikan mengeksploitasi buruh dengan bayaran yang tidak sepadan. Kondisi tersebut memicu terjadinya pertentangan kelas antara buruh dengan majikan. Buruh menyerang atas sumber daya majikannya. Para pemiilik tanah akan melawan, sehingga terjadi benturan keras antara majikan dan buruh. Karl Marx membumikan teori pertentangan kelas dengan beberapa tujuan, diantaranya: Pertama, sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi saat itu. Kedua, yaitu untuk menyerukan aksi kepada kaum miskin tertindas untuk melakukan revolusi. Pemikiran Karl Marx tersebut berhasil mendunia yang membuat kaum buruh melakukan perlawanan terhadap majikan (Bahari, 2010).

Revolusi Industri 4.0

Dalam buku karya Arnold Toynbee yang berjudul *Lectures On the Industrial Revolution* (1884) menjelaskan mengenai revolusi industri dan pengaruhnya terhadap kebijakan, budaya, dan politik Eropa pada zaman tersebut. Pemicu utama adanya revolusi industry adalah penemuan mesin uap oleh James Watt, hal tersebut kemudian berlanjut pada Revolusi Industri 2.0 yang ditandai dengan penemuan listrik sebagai bahan penerangan. Revolusi industri 3.0 ditandai dengn penemuan computer sebagai teknologi canggih yang membantu manusia menyelesaikan pekerjaannya. Penemuan teknologi canggih dan juga internet tersenut memicu kelahiran revolusi industri 4.0 yang memposisikan manusia sebagai subjek peradaban(Adha et al., 2020).

Revolusi industri 4.0 memberikan dampak yang signifikan terhadap tenaga kerja. Peran tenaga kerja digantikan oleh mesin, sehingga pabrik-pabrik yang mengikuti perkembangan zaman banyak yang menggunakan mesin untuk proses produksi. Angka pengangguran di prediksi meningkat pesat akibat adanya revolusi industri 4.0. Banyak tenaga kerja yang tidak terserap tergantikan oleh mesin-mesin canggih.

Ketenagakerjaan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjajaan adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lahir karena pada saat itu undang-undang yang dipakai adalah hukum kolonial yang menempatkan pekerja pada posisi yang tidak menguntungkan dan terjadi ketimpangan antara pekerja dan pemilik modal (Sinaga & Zaluchu, 2021). Undang-undang mengenai ketenagakerjaan hadir sebagai hukum yang mengatur ketengakerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dan yang akan datang. Undang-undang diharapkan dapat: Pertama, menegakkan perlindungan, jaminan dan hak-hak tenaga kerja. Kedua, Menjalankan berbagai instrument ketenagakerjaan yang telah di sepakati di kancah internasional. Ketiga, menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap aspek ketenagakerjaan (Sinaga & Zaluchu, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah literature review yang disajikan secara deskriptif. Sumber data yang disajikan berasal dari sumber-sumber bacaan yang relevan dan sudah dipublikasikan secara resmi. Langkah strategis yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dan sumber referensi dapat berupa kata kunci yang digunakan untuk mencari artikel yang relevan dengan judul makalah. Adapun kata kunci yang penulis maksud yaitu: teori pertentangan kelas Karl Marx, Sistem Sosialisme, revolusi industri 4.0, ketenagakerjaan, kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia era revolusi industri 4.0

Revolusi Industri pertama kali dikemukakan oleh Arnold Toynbee dalam buktunya yang berjudul ‘Lectures on The Industrial Revolution’ (London: Rivingston, 1884) (Adha et al., 2020). Ditemukannya internet dan teknologi informasi pada abad 21 memberikan pengaruh besar dalam munculnya revolusi industri 4.0. Hal ini menunjukkan kemajuan setelah di revolusi industri 3.0 ditemukannya komputer. Revolusi Industri 4.0 berimplikasi pada diposisikannya manusia sebagai subjek dari perubahan peradaban yang ada.

Ditemukannya internet dan teknologi informasi pada revolusi industri 4.0 nampaknya turut andil dalam mengubah cara hidup manusia, terlebih dalam kaitannya dengan pekerjaan. Perubahan yang terjadi adalah pada penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan robot dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kecerdasan buatan di dalam sistemika kehidupan manusia menjadi tantangan tersendiri para pekerja di belahan dunia manapun, tak terkecuali Indonesia.

Keberadaan revolusi industri yang terkontaminasi internet dan teknologi informasi memaksa para pekerja Indonesia untuk fleksibel menghadapi perubahan. Pekerjaan kasar dalam hal ini akan dapat dengan mudah tergantikan bila tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan yang sejalan dengan perubahan dan arus. Bagi perusahaan, keadaan demikian tergolong menguntungkan karena dapat menekan biaya produksi meski harus dilakukan dengan pengurangan pekerja. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Naveen Menon seorang Presiden Cisco untuk Asia Tenggara yang menyatakan bahwa bilamana teknologi baru diterapkan, produktivitas akan menurunkan biaya produksi, sehingga dapat membuat harga barang dan jasa turun (Adha et al., 2020).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN tentu terkena dampak signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja terhitung pada Februari Tahun 2022 adalah sekitar 135.611,90 orang (Badan Pusat Statistik, 2022). Meski tak dipetakan bidang pekerjaan dari jumlah angka yang tertera tersebut, namun sejatinya sebanyak 135.611,90 orang tersebut dipaksa untuk meningkatkan kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di era revolusi industri 4.0 ini bila tidak ingin menjadi bagian yang turut tergerus dalam era digitalisasi.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di ASEAN tidak tinggal diam menghadapi kenyataan revolusi industri 4.0 terlebih setelah diketahui bahwa sejatinya revolusi industri 4.0 memiliki signifikansi kecepatan dan lingkup dampak yang lebih cepat dibandingkan pada era revolusi industri sebelumnya. Terhadap hal tersebut, melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pemerintah diketahui telah mempersiapkan paling tidak sepuluh langkah prioritas nasional dalam mengimplementasikan peta jalan Making Indonesia 4.0. Adapun mengenai langkah tersebut antara lain: 1) Perbaikan alur aliran barang dan materi guna memperkuat produksi lokal pada sektor hulu; 2) Mendesain ulang zona industri termasuk dalam hal ini pengoptimalisasian kebijakan zona industri; 3) Mengakomodasi standar-standar berkelanjutan untuk membangun kemampuan industri nasional; 4) Memperdayakan UMKM dengan membangun platform e-commerce; 5) Membangun infrastruktur digital nasional, dalam hal ini termasuk internet dengan kecepatan tinggi; 6) Menarik minat investasi asing untuk mendorong adanya transfer teknologi ke perusahaan lokal; 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, berupa strategi perombakan kurikulum pendidikan dengan berfokus pada science, technology, engineering, the arts, dan mathematics. 8) Pembangunan ekosistem inovasi; 9) Insentif untuk investasi teknologi

berupa pendesainan ulang rencana insentif adopsi teknologi; dan 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka telah diketahui bahwa secara entitas negara, Pemerintah Indonesia memiliki kiat untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang tidak dapat dihindari tersebut. Meski secara entitas negara Pemerintah Indonesia telah memiliki strategi yang sistemik, namun tidak dapat terelakkan bahwa dalam hal entitas pekerja, perihal ketenagakerjaan masih sarat akan permasalahan-permasalahan dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Sebagaimana telah dipaparkan, sejatinya revolusi industri 4.0 merupakan suatu kemajuan besar dalam dunia perindustrian global, tak terkecuali Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hingga internet memberikan wajah baru dalam dunia perindustrian. Akan tetapi, hal ini berakibat pada akan banyak pekerjaan yang tidak lagi sejalan dengan tren revolusi industri 4.0 dan muncul tren pekerjaan baru yang sejalan dengan kemajuan yang ditawarkan, termasuk dalam hal ini otomatisasi. Keadaan tersebut akan berdampak pada tidak dibutuhkannya lagi peran manusia sebagai pekerja manual. Berdasarkan penelitian di Frey dan Osborne, terdapat sekitar 700 jenis pekerjaan dan paling tidak terdapat beberapa jenis pekerjaan yang terancam untuk diotomatisasi, seperti: telemarketer, penguji judul, abstraktor, pencari berkas, penjait, teknisi matematika, petugas asuransi, teknisi jam, agen kargo, pengiriman, petugas pajak, dan operator mesin pengolahan (Alam, et.all, 2019). Otomatisasi tersebut memberikan arti bahwa secara tidak langsung akan terjadi pergeseran kemampuan atau skill bagi para pekerja untuk dapat bertahan di era revolusi industri 4.0. Berkaca pada Indonesia, sejatinya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) memang telah turut serta dalam strategi Pemerintah dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yakni dengan cara menanamkan kurikulum baru dengan materi yang selaras dengan revolusi digital 4.0. Terhadap hal tersebut, tentu merupakan hal yang patut diapresiasi.

Akan tetapi, strategi tersebut dipersiapkan hanya untuk calon sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang. Sementara itu, terhadap masyarakat Indonesia yang saat ini mengabdikan diri sebagai tenaga kerja dapat menimbulkan suatu tantangan dan permasalahan tersendiri. Indonesia dengan sumber daya manusia (SDM) berlimpah tidaklah sejalan dengan kualitas yang ada pada masing-masing Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di Indonesia masih sangat terbatas dan

masih bersifat konvensional. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 tentu dibutuhkan peningkatan kemampuan, akan tetapi peningkatan kemampuan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain aspek pendidikan dan perekonomian yang dalam hal ini kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia menyebabkan banyaknya kendala termasuk dalam kaitannya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terhadap hal ini, sumber daya manusia (SDM) yang tidak meng-upgrade kemampuan mungkin masih dibutuhkan, namun dalam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti jumlah terbatas, upah yang kurang memadai, hingga kekhawatiran tergerus peradaban sewaktu-waktu.

Permasalahan ketenagakerjaan lain yang timbul di era revolusi industri 4.0 juga terdapat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sebagaimana telah disinggung bahwa terhadap era revolusi industri 4.0 Pemerintah Indonesia tentu memiliki strategi dan kebijakan. Akan tetapi, dalam penerapannya masih terdapat tumpang tindih kebijakan yang dapat mengganggu jalannya revolusi industri 4.0 dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan (Pablo, 2018).

Relevansi Teori Pertentangan Kelas Karl Max Terhadap Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0

Pemikiran Karl Marx relevan dengan kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia di era revolusi industri 4.0. Walaupun sebenarnya industri di Indonesia masih banyak yang bermain di tatanan revolusi industri 2.0 dan 3.0, tetapi revolusi industri 4.0 sudah banyak berlaku di industri-industri besar di Indonesia, yang seharusnya banyak menyerap tenaga kerja (Abdillah et al., 2021). Hal tersebut terjadi karena banyak perusahaan besar yang mengikuti perkembangan zaman menggantikan peran manusia sebagai pekerja dengan mesin-mesin canggih untuk produksi. Dampaknya, pengangguran semakin bertambah. Selain itu, pabrik-pabrik yang masih menggunakan tenaga manusia pun juga terjadi ketimpangan. Realitanya, di negara berkembang, upah buruh masih terbelah minim. Jam kerja buruh cenderung menguntungkan para pemilik modal dibandingkan dengan para buruh yang bekerja. Hak-hak buruh terkadang masih tidak terpenuhi, sehingga beberapa kali buruh melakukan perlawanan dengan melakukan demo di depan Gedung pemerintahan untuk menuntut hak mereka.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Februari 2022, jumlah Angkatan kerja di Indonesia meningkat sebanyak 4,20 persen jika dibanding dengan Februari 2021. Pada

Februari 2022 jumlah Angkatan kerja sebanyak 144,01 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,98 persen poin. Jika melihat jumlah Angkatan kerja di Indonesia yang semakin naik, pemerintah membutuhkan strategi khusus dan kesiapan untuk mengatasi dampak revolusi industri 4.0. Pemerintah juga perlu mempersiapkan aspek sosial ekonomi, karena revolusi industri 4.0 cenderung sedikit menyerap tenaga kerja. Sedangkan, di Indonesia sebagai negara yang berkembang dan memiliki banyak Angkatan kerja, membutuhkan industry yang mampu mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru. Jadi semestinya pemerintah perlu mempertimbangkan arah kebijakan untuk merespon adanya revolusi industri 4.0.

Artificial Intelligence (AI) dan robot menggantikan peran tenaga kerja di industri (Abdillah et al., 2021). Pekerjaan yang sederhana dan mendasar memiliki risiko tinggi untuk digantikan dengan mesin. Tidak hanya pekerjaan yang mendasar yang digantikan oleh mesin, pekerjaan yang bersifat administratif juga akan digantikan oleh mesin atau kecerdasan buatan. Terdapat tren, bahwa pekerjaan tingkat menengah semakin berkurang yang menimbulkan polarisasi pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan yang kreatif serta melalui proses pengambilan keputusan yang kompleks merupakan jenis pekerjaan yang sulit tergantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan. Permintaan pekerja atas pekerjaan tersebut akan meningkat di masa yang akan mendatang.

Pada awal bulan April 2018, Pemerintah Indonesia merilis kebijakan strategis nasional khususnya dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0 yakni focus utama terdiri dari industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Arah yang dituju pemerintah sudah jelas mengenai industry-industri tersebut. Pemerintah Indonesia juga merilis Peraturan Presiden (Perpres) No.2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019. Perpres tersebut menimbang untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 yang membahas mengenai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Revolusi Industri 4.0 dasar utamanya adalah internet dan juga Teknologi Informasi (TI) yang memicu perubahan yang cukup signifikan bagi masyarakat dalam hal ini pola kerja, pola pikir, dan kehidupan warga di berbagai negara. Dalam dasar hukum di suatu negara haikatnya harus mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam setiap proses kehidupan manusia. Kebijakan-kebijakan yang di tetapkan harus bersifat dinamis dan fleksibel yang dapat merespon

perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat secara cepat (Abdillah et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan revolusi industri 4.0 di berbagai bidang industri di Indonesia telah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui strategi-strategi penyesuaian. Akan tetapi, permasalahan ketenagakerjaan akibat revolusi industri 4.0 tidak terelakkan. Permasalahan tersebut seperti tergerusnya tenaga kerja yang tidak dapat meningkatkan kemampuan karena berbagai alasan, ancaman pengangguran akibat tergantikannya dengan mesin, dan adanya kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih
2. Relevansi revolusi industri 4.0 dengan teori pertentangan kelas Karl Marx adalah terdapat pada adanya ketimpangan dalam bidang industri, termasuk dalam hal ini terhadap upah dan jam kerja buruh yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya kelas sosial buruh. Terhadap hal ini, Pemerintah strategi khusus dan kesiapan untuk mengatasi dampak revolusi industri 4.0. Pemerintah juga perlu mempersiapkan aspek sosial ekonomi, karena revolusi industri 4.0 cenderung sedikit menyerap tenaga kerja yang apabila tidak teratasi akan berdampak pada kesejahteraan buruh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., Oka Prastio, L., & Nur Effendi, S. (2021). Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia. *Jurnal Identitas*, 1(2), 48–61. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.155>.
- Adha, H., Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2020). Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia Industrial Digitalization And Its Impact on Labor and Employment Relationships In Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>.
- Alam, Teguh G, et.all. (2019). *Revolusi Industri Keempat: Akhir dari Buruh di Seluruh Dunia*. Jurnal Hubungan Internasional.
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah dan Presentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran 2021-2022”. <https://bps.go.id/indicator/6/1953/1/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html> diakses pada 27 Juni 2022.
- Bahari, Y. (2010). *Karl Marx: Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. “Pemerintah Keluarkan 10 Jurusan Hadapi Revolusi Industri 4.0”. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/19169/Pemerintah-Keluarkan-10-Jurus-Jitu-Hadapi-Revolusi-Industri-4.0> diakses pada 27 Juni 2022.
- Pablo, S. (2018). *Ini 10 Tantangan RI di Era Industri 4.0 Menurut Menperin*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180417185422-4-11394/ini-10-tantangan-ri-di->

era-industri-40-menurut-menperin diakses pada 27 Juli 2022.

Prinada, Y. (2022). *Perbedaan Teori Konflik Karl Marx dan Rlf Dahrendorf*. <https://tirto.id/perbedaan-teori-konflik-karl-marx-dan-ralf-dahrendorf-gh6L> diakses pada 27 Juni 2022.

Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2021). *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Presiden (Perpres) No.2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019

